



PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN (PMS): LEMBAGA ADAT PENJAGA IDENTITAS ETNIK SIMALUNGUN, 1964-1969

Zulham Siregar*

STKIP A1-Maksum Langkat, Indonesia

ABSTRACT

*This article discusses the history and role of the Partuha Maujana Simalungun (PMS) indigenous institutions in maintaining and preserving Simalungun culture which has begun to erode with the entry of various foreign cultures. This research uses historical research methods with four steps, namely: heuristics, verification, interpretation, and historiography. Primary sources collected from official archive such as *Memorie van Overgave* and *Besluit*, and secondary sources collected from the books, journals, and previous scientific research. The findings in this study are that the Partuha Maujana Simalungun (PMS) was established in 1964 as a continuation of efforts to strengthen Simalungun ethnic identity that has faded. In its journey, this institution succeeded in strengthening Simalungun ethnic identity through several ways, including: formulating clans, regulating customary and marriage laws, and establishing Simalungun ethnic languages and characters.*

ARTICLE HISTORY

Submitted 22 January 2022
Revised 17 February 2022
Accepted 03 March 2022
Published 22 March 2022

KEYWORDS

Partuha Maujana Simalungun; identity strengthening; Simalungun ethnicity.

CITATION (APA 6th Edition)

Siregar, Z. (2022). Partuha Maujana Simalungun (PMS): Lembaga Adat Penjaga Identitas Etnik Simalungun, 1964-1969. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(1), 59-68.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

siregarzulham20@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.4887>

PENDAHULUAN

Etnik Simalungun merupakan salah satu etnik yang ada di Indonesia. Etnik ini mayoritas berada di wilayah yang saat ini masuk ke dalam administratif Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar (Agustono et al., 2012). Etnik Simalungun merupakan salah satu etnik yang sudah melewati rangkaian dinamika perkembangan sejak masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, dan revolusi sosial yang menyebabkan raja dan para bangsawannya terbunuh (Siregar, 2020). Dinamika panjang ini serta pertemuan dengan berbagai kebudayaan menjadikan etnik Simalungun sempat mengalami krisis identitas.

Dalam beberapa pernyataan disebutkan bahwa perjumpaan awal budaya asing dengan etnik Simalungun terjadi pada abad ke-6 M yang berasal dari Tiongkok. Namun penulis sendiri belum dapat menemukan sumber yang menguatkan argumen ini. Sementara dalam catatan sejarah, sejak awal abad ke-20 M, etnik Simalungun mulai memasuki babak sejarah baru setelah datangnya Kolonial Belanda dengan membawa *pengaruh* dalam bidang politik dan budaya. Periode ini dikenal dengan istilah ekspansi kolonial (*pax neerlandica*), yang bertujuan untuk meluaskan pengaruh Kolonial Belanda di luar Jawa (Saragih, 2018).

Kehadiran Kolonial Belanda di wilayah Simalungun berperan dalam menyebabkan tergerusnya identitas asli Simalungun. Pasalnya pada masa tersebut, pihak Kolonial Belanda mengharuskan penduduk Simalungun untuk patuh dan tunduk kepada Raja-Raja Simalungun dan kalangan bangsawan lainnya (Purba et al, 2011). Kolonial Belanda pada masa tersebut mengarahkan penduduk Simalungun pada kegiatan-kegiatan yang hanya memberi keuntungan untuk mereka. Pada masa ini juga pembelajaran terhadap kebudayaan asli Simalungun mulai berkurang dengan intervensi yang dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda. Hal ini juga yang ikut melatarbelakangi etnik Simalungun perlahan melupakan budaya aslinya (Saragih & Nababan, 2021).

Krisis identitas di kalangan etnik Simalungun semakin bertambah ketika terjadi gerakan penginjilan oleh para misionaris Jerman di bawah lembaga zending *Rheinische Missionsgesellschaft* (RMG) yang dibantu oleh para misionaris asal etnik Batak Toba (Dasuha, 2003). Penggunaan bahasa dan budaya Batak Toba yang dominan dalam proses tersebut menyebabkan gerakan penginjilan di wilayah Simalungun tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Dominasi tersebut juga menyebabkan orang-orang Simalungun merasa kehilangan jati dirinya sebagai orang asli Simalungun (*hasimalungunon*) (Sipahutar, Hutaeruk, & Asnewastri, 2019).

Sebenarnya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menguatkan identitas etnik Simalungun sudah lama dilakukan. Pada 13 Oktober 1928, 14 orang misionaris asal Simalungun berkumpul untuk membahas cara-cara penginjilan di wilayah Simalungun. Bagi mereka, penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Toba dengan menggunakan bahasa Toba menjadi sebab tersendatnya kristenisasi di wilayah Simalungun. Oleh sebab itu mereka bersepakat untuk melakukan penginjilan yang dilakukan langsung oleh orang-orang Simalungun dan menggunakan bahasa Simalungun. Sebagai upaya untuk mendukung rencana tersebut, 14 orang misionaris Simalungun ini bersepakat mendirikan sebuah lembaga bernama *Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen* (Tarigan, 2013). Namun lembaga tersebut hanya bertahan sampai tahun 1942. Pasalnya pasca Jepang masuk, lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan dihentikan seluruh aktivitasnya.

Tidak hanya sampai di situ, semangat untuk menunjukkan identitas etnik Simalungun juga kembali menguat pada tahun 1953. Orang-orang Simalungun menuntut agar mereka dapat mendirikan gerejanya sendiri yang diberi nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang bercorak Simalungun dan dikelola oleh mereka sendiri. Sehingga gereja ini nantinya tidak terikat dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang bercorak etnik Toba dan berpusat di Pearaja (Saragih, 2018). Akhirnya pada tahun 1963, HKBP Pearaja memenuhi tuntutan orang-orang Simalungun yang ditandai dengan pelepasan (*manjae*), serta memiliki gerejanya sendiri.

Setelah melewati berbagai dinamika dan upaya dalam menggalang kesatuan di dalam etnik Simalungun. Puncaknya pada tahun 1964, tokoh-tokoh terkemuka Simalungun pada masa itu, seperti: Pdt. J.P. Siboro, Purba Tambak, dan tokoh-tokoh lainnya, berinisiatif untuk menyatukan semua elemen dalam etnik Simalungun ke dalam sebuah lembaga adat yang diberi nama Partuha Maujana Simalungun (PMS). Lembaga adat ini hadir untuk merestorasi dan membangkitkan kembali kebudayaan asli Simalungun yang sudah mulai kehilangan jati dirinya (Purba, 1995).

Lembaga adat ini diresmikan bersamaan dengan diselenggarakannya Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia pertama pada tahun 1964. Latar belakang diresmikannya lembaga adat ini berawal dari kegelisahan akan identitas etnik Simalungun yang sudah mulai kehilangan jati dirinya. Kehadiran PMS menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah panjang akan dinamika yang dialami oleh etnik Simalungun sejak dahulu.

Lembaga adat ini memiliki visi agar masyarakat Simalungun terus menjaga dan mengembangkan kebudayaannya, sehingga ikut memberi andil dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. Lewat lembaga ini juga, masyarakat Simalungun dibekali pemahaman agar dapat menjaga kemurnian nilai-nilai asli kebudayaannya dari pengaruh buruk budaya asing. Sebagai wujud nyata dalam upaya tersebut, lembaga adat ini juga mendirikan Yayasan Kebudayaan Simalungun yang diharapkan dapat melaksanakan hubungan kebudayaan secara timbal balik di antara berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini ingin melihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat etnik Simalungun mengalami krisis identitas di dalam dinamika kemasyarakatannya. Namun fokus utamanya ialah, penelitian ini ingin melihat bagaimana lembaga

adat Partuha Maujana Simalungun (PMS) berhasil menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Simalungun dan menjaga identitas etniknya. Penulis menetapkan lingkup temporal 1964-1969, tahun 1964 ditetapkan sebagai batas awal sebagai tahun berdirinya lembaga ini, sementara 1969 sebagai batas akhir ditetapkan karena berakhirnya periode pertama dari lembaga adat ini.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Menurut Daliman, metode sejarah adalah seperangkat aturan sistematis yang didesain guna membantu secara tajam dan menyuguhkan temuan-temuan yang didapat secara tertulis. Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ada empat, yaitu: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Daliman, [2018](#)). Pada tahap pertama, penulis mengumpulkan dua jenis sumber, yaitu: sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip penulis dapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di antaranya *Memorie van Overgave* dan *Besluit*, serta wawancara terstruktur dan non-struktur dengan narasumber yang penulis anggap berkompeten untuk membantu menjawab masalah dalam penelitian ini. Sementara untuk sumber sekunder berupa buku, surat kabar, terbitan berkala, jurnal, dan penelitian terkait lainnya baik yang berbahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris, penulis dapat di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Tengku Luckman Sinar, dan Perpustakaan Pusat Studi Ilmu-Ilmu Sosial (PUSIS) UNIMED. Tahap kedua, sumber yang sudah terkumpul penulis kritik secara internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan terhadap isi sumber, apakah sumber tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan atau tidak. Kritik eksternal penulis lakukan untuk menguji otensitas bagian luar sumber yang sudah dikumpulkan. Tahap ketiga, sumber yang sudah penulis kritik kemudian penulis tafsirkan dan membandingkannya untuk diceritakan kembali dalam bentuk tertulis. Namun pada tahap ini penulis menghindari subjektivitas dalam menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang sudah melewati tahap kritik. Tahap keempat, penulisan (historiografi) dilakukan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan secara kritis-analitis dapat dituliskan secara sistematis dan kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun (PMS)

Perjumpaan orang Simalungun dengan bangsa Eropa khususnya Kolonial Belanda, terjadi pada akhir abad ke-19 dan semakin intens pada awal abad ke-20, sebagai dampak dibukanya perkebunan secara besar-besaran di wilayah Sumatera Timur dan berlanjut sampai ke wilayah Simalungun (Bremen, [1997](#)). Pembukaan perkebunan memaksa pihak Kolonial Belanda ikut campur tangan terhadap kehidupan masyarakat Simalungun. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset-aset milik perusahaan perkebunan Belanda yang ada di wilayah Simalungun. Namun demikian, pihak Kolonial Belanda melabeli masyarakat Simalungun dengan istilah “Batak Merdeka”, yang memiliki arti bahwa penduduk di wilayah ini memiliki kedaulatannya sendiri yang membedakannya dengan penduduk Batak lainnya, khususnya Batak Toba (Agustono et al., [2012](#)).

Campur tangan ini kemudian membuat pihak penguasa lokal di Simalungun melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda. Beberapa penguasa lokal seperti; Tuan Rondahaim Saragih (Raja Raya); Sang Nawaluh Damanik (Raja Siantar); Djittar Sinaga (Raja Tanah Jawa); Djontama Purba Dasuha (Raja Panei); dan Tandjarmahai Purba (Raja Dolok Silau) mencoba melakukan perlawanan terhadap dominasi Kolonial Belanda di Simalungun (Damanik, [2017](#)). Namun menjelang akhir abad ke-19 M sampai awal abad ke-20 M, perlawanan ini dapat diatasi secara penuh lewat penandatanganan sebuah perjanjian dalam sebuah Plakat Pendek (*Korte Verklaring*), antara para penguasa lokal Simalungun dan pihak Kolonial Belanda yang diwakili oleh C. J. Westenberg sebagai Asisten Residen urusan Batak (SoK *Besluit* No. 34, [1904](#)). Setelah perjanjian ini ditandatangani, secara penuh pihak

Kolonial Belanda mengatur kehidupan masyarakat Simalungun, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, secara berangsur pihak Kolonial Belanda memberlakukan berbagai peraturan kepada orang-orang Simalungun. Peraturan ini juga berlaku bagi para penguasa dan bangsawan Simalungun yang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda (Neiboer, [1934](#)). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kolonial Belanda mengharuskan orang-orang Simalungun untuk membaca, menulis, dan berhitung menggunakan bahasa Belanda. Padahal hal ini sebelumnya tidak tersedia di lembaga pendidikan tradisional Simalungun (Purba, [2003](#)).

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda terhadap kehidupan masyarakat Simalungun, mengakibatkan kehidupan masyarakat mencontoh kehidupan Barat, terutama di kalangan bangsawan Simalungun. Krisis identitas terus terjadi pada masyarakat Simalungun pada masa itu (Ponja, Siregar, & Azhar, [2020](#)). Ditambah lagi gerakan kristenisasi yang dibawa oleh para penginjil *Rheinische Missionsgesellschaft* (RMG) yang dibantu oleh para misionaris asal etnik Batak Toba, semakin menghilangkan jati diri masyarakat Simalungun. Kristenisasi ini kemudian mengalami kemandekan, pasalnya RMG keliru menyamakan antara masyarakat Simalungun dengan Toba. Kekeliruan ini kemudian segera disadari oleh beberapa orang, dan sebagai upaya perbaikan, didirikanlah *Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen* yang bertujuan untuk mengoptimalkan kristenisasi di Simalungun (Hutauruk, [1993](#)).

Semangat untuk membangkitkan kembali identitas Simalungun juga terjadi pada tahun 1953 M, ketika orang-orang Simalungun tidak puas dengan otonomi dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang didominasi oleh etnik Toba (Lumbantobing, [1992](#)). Sebagai wujud protes akan hal tersebut, orang-orang Simalungun mendirikan Huria Kristen Batak Protestan Simalungun (HKBPS) yang bercirikan kebudayaan Simalungun. Tidak hanya sampai di situ, HKBPS juga kemudian menuntut pelepasan secara penuh kepada pihak HKBP yang berpusat di Pearaja. Sebelum tuntutan ini direalisasikan, orang-orang Simalungun mengubah nama gereja mereka menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) sebagai pembeda dengan gereja HKBP (Pedersen, [1970](#)).

Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan orang-orang Simalungun, pihak HKBP Pearaja kemudian mengabulkan permintaan tersebut yang menjadikan etnik Simalungun terlepas dari Pearaja dan memiliki gereja sendiri yang diberi nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Pelepasan ini dan berdirinya GKPS pada 2 September 1963, menjadi keberhasilan orang-orang Simalungun dalam upaya untuk mengembalikan identitas etnik mereka yang sebelumnya sudah tergerus. Walaupun gereja baru ini tidak semuanya beragama Protestan, namun penguatan identitas Simalungun yang menjadi tujuan utamanya. Orang-orang Simalungun beranggapan bahwa mereka terikat oleh persaudaraan yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Berangkat dari hal tersebut, mereka bersatu dalam rangka menunjukkan identitas asli mereka sebagai orang Simalungun (Purba, [1977](#)).

Hadirnya GKPS merupakan salah satu dari beberapa rangkaian akan proses pencarian identitas bagi orang-orang Simalungun. Gerakan lainnya ialah penyelenggaraan Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia pertama pada tahun 1964. Seminar ini menjadi tonggak awal akan pengembalian dan perbaikan terhadap kebudayaan Simalungun. Seminar ini berhasil menginisiasi berbagai kegiatan dan penelitian lainnya sebagai upaya pengenalan *hasimalungunon* kepada generasi pelanjut.

Dalam pelaksanaan seminar tersebut, terdapat beberapa tema pokok yang dibahas, yaitu: perihal silsilah marga, bahasa dan aksara, kesenian yang di dalamnya melingkupi tarian dan nyanyian,

hukum adat, olahraga/permainan, dan hal lainnya yang menyangkut tentang kebudayaan Simalungun. Seminar tersebut menjadi salah satu upaya etnik Simalungun dalam menonjolkan kebudayaannya. Seminar tersebut juga menjadi salah satu langkah masyarakat Simalungun untuk menetapkan kategori dari perilaku interaksi mereka dengan etnik-etnik lainnya (wawancara dengan Djapanten Purba).

Melalui seminar tersebut, "*ahap*" ditetapkan menjadi identitas asli etnik Simalungun. Istilah *ahap* dianggap sebagai moralitas budaya Simalungun yang universal, sehingga dapat mewakili kebudayaan dan etnik Simalungun seluruhnya. Hasil kesepakatan dalam seminar tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan kebudayaan Simalungun ke depannya. Namun dalam seminar tersebut juga diakui bahwa pada masa sekarang, batas-batas etnisitas antara satu dengan yang lainnya sudah semakin kabur. Oleh sebab itu, pemaknaan ulang terhadap suatu budaya diharapkan dapat sesuai dengan perubahan sosial-budaya yang akan terjadi.

Tidak cukup sampai di situ, para tokoh-tokoh terkemuka Simalungun kemudian juga menginisiasi untuk mempopulerkan *ahap* sebagai identitas dalam merajut persatuan dan kesatuan di kalangan etnik Simalungun. Tokoh-tokoh tersebut ialah: Pdt. JP Siboro (Wakil Ephorus HKBPS), Tuan Bandaralam Purba Tambak (Keturunan Raja Silou yang beragama Muslim), dan beberapa tokoh lainnya. Mereka menginisiasi untuk mendirikan lembaga dalam merajut seluruh elemen dalam etnik Simalungun, lembaga ini kemudian diberi nama Partuha Maujana Simalungun (PMS). *Partuha* diartikan sebagai tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat; sedangkan *Maujana* adalah kaum terpelajar, cendekiawan, kaum muda TNI, Polri, dan PNS. Elemen-elemen penting dalam etnik Simalungun kemudian saling bersinergi untuk membangkitkan dan memperluas budaya Simalungun yang sempat redup (Purba et al., [2011](#)).

Kehadiran lembaga ini tidak otomatis mengembalikan kebudayaan Simalungun yang sudah berakulturasi dengan berbagai macam budaya menjadi seperti wujud aslinya. Proses pengembalian kebudayaan yang sudah bercampur-baur itu memerlukan proses yang panjang. Kehadiran lembaga ini pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan kebudayaan di dalam sebuah masyarakat. Fungsi utamanya ialah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang masih ada di tengah masyarakat untuk terus dipraktikkan. Lembaga ini juga berperan dalam mewariskan dan mensosialisasikan adat-istiadat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Simalungun (wawancara dengan Erond L. Damanik).

Dalam lingkup temporal penelitian ini, Partuha Maujana Simalungun (PMS) harus berupaya untuk melawan berbagai gerakan separatisme yang tersebar di Indonesia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Radjamin Purba yang beranggapan bahwa merebaknya gerakan ketidakpuasan daerah kepada pusat disebabkan oleh sentimen etnik dan agama yang sudah tercabut dari akarnya (wawancara dengan Radjamin Purba).

Sebagai upaya untuk mencegah agar gerakan ketidakpuasan ini tidak merebak di kalangan masyarakat Simalungun. Tokoh-tokoh Simalungun berinisiatif untuk merangkul seluruh elemen masyarakat ke dalam lembaga adat ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Raminah Br. Garingging yang menyebutkan bahwa proses untuk menguatkan identitas sebuah etnik memerlukan proses yang panjang dan harus memiliki sebuah lembaga yang mengatur hal tersebut (wawancara dengan Raminah Br. Garingging). Tambahnya, hadirnya lembaga PMS didasari niat tulus orang-orang Simalungun yang merasa bahwa kebudayaan asli mereka sudah mengalami banyak perubahan dan terjebak oleh kejadian-kejadian pada masa lalu.

Partuha Maujana Simalungun (PMS) Melestarikan Kebudayaan Simalungun

Pada awal pendiriannya, lembaga adat Partuha Maujana Simalungun (PMS) bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Simalungun dari berbagai pengaruh kebudayaan asing. Namun pada sisi lain, lembaga ini berdiri pada saat terjadi pergolakan antara orang-orang di daerah dan pusat yang disebabkan oleh ketidakpuasan serta transisi kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Hal ini diperkuat oleh Radjamin Purba S.H. (Bupati Simalungun 1960-1973) yang mengatakan kepada penulis bahwa gerakan separatisme bermula dari ketidakpuasan daerah terhadap sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat (wawancara dengan Radjamin Purba).

Tambahnya, daerah-daerah yang sudah tidak memiliki akar kebudayaan yang kuat menjadi salah satu faktor terjadinya gerakan yang menolak pemerintah pusat. Menurutnya, kebudayaan pada setiap daerah bertujuan untuk membangun karakter dan spiritual yang kuat, sehingga dapat menyokong pembangunan bangsa. Oleh sebab itu beliau beserta beberapa tokoh Simalungun lainnya pada masa itu mendirikan Partuha Maujana Simalungun (PMS) sebagai upaya untuk memperkuat identitas etnik Simalungun, agar tidak tergerus dan terpengaruh oleh gerakan-gerakan tersebut.

Kesadaran orang-orang Simalungun terhadap kebudayaan aslinya merupakan modal besar dalam memperkuat identitas etniknya. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang saling bekerja sama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap identitasnya. Namun jika tidak ada kerja sama dari semua pihak, dapat saja suatu saat nanti tradisi dan kebudayaan Simalungun akan hilang. PMS sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Simalungun memiliki beberapa upaya dalam hal tersebut, yaitu:

Merumuskan Marga-Marga Etnik Simalungun

Dalam adat Simalungun, marga menjadi hal yang sangat penting, pasalnya marga berperan dalam menentukan silsilah dan sejarah setiap generasi agar tidak terputus. Adanya marga ini bertujuan agar setiap kelompok tertentu memiliki ikatan darah (*samudar*). Marga mengandung makna identitas sedarah, satu nenek moyang, dan silsilah. Marga-marga ini juga memiliki status sosial yang membedakannya antara marga raja, boru, dan marga yang ada di sebuah kampung (*huta*).

Pada tahun 1930 pernah dilakukan sebuah rapat adat bernama “*Harungguan Bolon*” yang mengusulkan untuk mempertahankan 4 marga utama di Simalungun. Namun hasil rapat tersebut belum dapat diwujudkan karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, salah satunya terdapat beberapa Raja Simalungun yang beristri lebih dari satu (*nasipuang*). Penyebutan raja yang memiliki istri lebih dari satu dengan penyebutan *Nasipuang* adalah hal yang salah, seharusnya raja tersebut dipanggil dengan nama marga cabangnya (Damanik, [2018](#)).

Sebagai contoh apabila raja mempunyai 3 istri dari klan “Purba” maka dalam menyebut nama mereka umpamanya “*Puang Pardahan*” yaitu istri yang bertugas memasak, lalu “*Puang Paninggiran*” yaitu istri yang bertugas dalam mempersiapkan sesembahan, dan “*Puang Siappar Apei*” yaitu istri yang bertugas mengembangkan tikar dan lain-lain. Dari hal tersebutlah perlunya diusulkan untuk mempergunakan cabang marga etnik Simalungun dan bukan untuk meresmikan cabang marga di istana menjadi pokok marga.

Hal ini yang kemudian menjadikan kehadiran lembaga adat seperti PMS sangat diperlukan untuk merumuskan marga dan cabang-cabangnya dari etnik Simalungun agar tidak terjadi kerancuan. Upaya ini direalisasikan oleh PMS dengan menyelenggarakan sebuah seminar untuk merumuskan marga-marga yang ada di Simalungun. Berangkat dari hal tersebut, banyak orang-orang Simalungun yang berpendapat bahwa jumlah marga yang ada di Simalungun akan terus bertambah, karena perumusan tersebut belum seluruhnya selesai.

Salah satu pelaku sejarah yang ikut berhadir menyaksikan pelaksanaan seminar perumusan ini ialah Pdt. J.W. Saragih. Menurutnya, etnik Simalungun masih memegang teguh adat perkawinan yang berasal dari marga/klan yang berbeda (pernikahan eksogami). Sementara pernikahan yang berasal dari marga/klan yang sama (pernikahan endogami) merupakan sebuah pantangan. Marga-marga yang sampai saat ini masih ada dan eksis di Simalungun ialah Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba (disingkat: Sisadapur). Status marga-marga ini kemudian dinaikkan menjadi marga keturunan atau marga asli (wawancara dengan Pdt. J. Wismar Saragih).

Seminar tersebut kemudian membuahkan hasil bahwa etnik Simalungun memiliki dinamika kebudayaannya tersendiri. Oleh sebab itu, PMS sebagai lembaga adat yang menginisiasi seminar tersebut, merekomendasikan agar setiap marga melakukan musyawarah pada internal masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menentukan sejarah dan silsilah marga-marga tersebut dan menetapkan sebagai cabang dari marga etnik Simalungun. Adapun marga utama dan cabang yang dimiliki oleh etnik Simalungun menurut pencatatan PMS ialah:

Tabel 1. Marga utama dan cabang dari etnik Simalungun

Marga Purba dan Turunannya	Marga Saragih dan Turunannya	Marga Damanik dan Turunannya	Marga Sinaga dan Turunannya
Tambak	Sumbayak	Bariba	Sidahapintu
Sidasuha	Garingging	Tomok	Sidahalogan
Sidadolog	Sidauruk	Ambarita	Simaimbun
Sidagambir	Turnip	Rampogos	Sidasuhut
Pakpak	Simarmata	Gurning	Simanjorang
Tondang	Sitio	Seula	Simandalahi
Siboro	Dajawak	Sarasan	Dadihayong Bodat
	Sitanggang	Usang	
		Bayu	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis.

Merumuskan Hukum Adat dan Perkawinan Etnik Simalungun

Dalam sistem masyarakat Simalungun, dikenal istilah perkawinan beda marga (eksogami) antara laki-laki dan perempuan. Idealnya dalam tradisi Simalungun, seharusnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan dari saudara lelaki ibu si laki-laki (*marboru ni tulang*) atau seorang perempuan menikahi anak lelaki dari saudara bapak si perempuan (*maranak ni amboru*). Sementara pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama (endogami) menjadi suatu hal yang sangat terlarang. Apabila hal itu terjadi, maka masyarakat Simalungun akan mengalienasi pelaku tersebut dalam lingkup adat maupun interaksi sosial karena sudah melanggar aturan adat yang ditetapkan.

Dalam kebiasaan masyarakat etnik Simalungun sebelum melaksanakan suatu upacara pernikahan, maka terlebih dahulu kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan) membuat kesepakatan apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing. Sehingga nanti dalam prosesi acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan hasil yang diinginkan. Biasanya sebelum melaksanakan upacara pernikahan (*marhajabuan*), calon mempelai laki-laki (*parana*) dan calon mempelai perempuan (*panakboru*) akan membuat kesepakatan bahwa mereka akan menjalin sebuah ikatan pernikahan. Kemudian kedua calon mempelai ini akan meminta izin kepada orang tua/paman (*mangalop bona boli*), diteruskan dengan membicarakan perihal mahar (*marlasalasa*), bentuk acara pernikahan yang akan dilaksanakan, berjanji (*marpadan*), menjemput (*maralop*), dan sampai akhirnya mereka melangsungkan pernikahan (Saragih, 2008).

Pernikahan yang ideal bagi etnik Simalungun ialah dengan cara dijemput secara baik-baik (*alop dear*). Proses ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga akan disepakati bahwa upacara pernikahan akan dilaksanakan di kediaman si mempelai perempuan. Dalam proses ini juga dikenal sebuah istilah pekerjaan dalam satu hari (*horja sadari*) dengan menggunakan adat yang akan selesai diselesaikan sampai tuntas (*adat na gok*). Selain itu juga dikenal upacara pernikahan yang dilakukan di kediaman sang mempelai laki-laki atau dikenal dengan sebutan antar jual (*taruhon jual*).

Menetapkan Bahasa dan Aksara Etnik Simalungun

Orang-orang Simalungun menggunakan bahasa Simalungun dalam berbicara dan berkomunikasi. Bahasa Simalungun merupakan bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia (Damanik, [2017](#)). Menurut Voorhoeve, bahasa Simalungun berada di antara dua rumpun bahasa, yaitu: Batak utara dan selatan. Hal berbeda disampaikan oleh Adelaar, menurutnya bahasa Simalungun berasal dari turunan bahasa Batak selatan yang terpisah dari bahasa-bahasa Batak lainnya, bahkan sebelum adanya bahasa Toba dan Mandailing yang sekarang.

Menurut Uli Kozok, bahasa Batak terbagi menjadi dua kelompok besar bahasa, yaitu: (1) Angkola, Mandailing, Toba (Batak selatan); dan (2) Karo, Pakpak (Batak utara). Sementara itu bahasa Simalungun berada di antara kedua rumpun bahasa tersebut. Bahasa Simalungun juga terbagi ke dalam empat dialek, yaitu: (1) Silimakuta; (2) Raya; (3) Horisan (sekitar pesisir Danau Toba); (4) dan Jahe-Jahe (pesisir timur Sumatera) (Kozok, [1999](#)). Hal yang sangat membedakan antara bahasa Simalungun dan bahasa Toba adalah pada bagian intonasi. Bahasa Simalungun lebih halus sehingga lebih dekat dengan bahasa Mandailing dan Angkola, daripada bahasa Toba, Karo, ataupun Pakpak. Bahasa Simalungun juga memiliki struktur tata bahasa bertingkat, sehingga dalam berbahasa orang-orang Simalungun dituntut untuk menghormati dan menggunakan bahasa sesuai konteksnya. Hal ini juga berimplikasi pada tataran kelas sosial yang ada pada etnik Simalungun (Tarigan, [1987](#)).

Sejak Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk para pribumi di wilayah Purba, mereka menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar, sementara bahasa Simalungun dijadikan bahasa kedua. Hal yang sama juga dilakukan oleh para zending dalam melakukan kristenisasi di wilayah Simalungun, yang menjadikan bahasa Toba sebagai bahasa pengantar, sementara bahasa Simalungun menjadi bahasa kedua. Keadaan tersebut bagi orang-orang Simalungun adalah tidak menghargai budaya asli mereka. Oleh sebab itu mereka menuntut para zending untuk memakai bahasa Simalungun dan memasukkan cerita-cerita rakyat Simalungun (Hutauruk, [1993](#)).

Dalam perkembangan selanjutnya setelah orang-orang Simalungun menuntut para zending tersebut. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Simalungun terus mengalami peningkatan, sementara yang menggunakan bahasa Melayu dan Toba mengalami penurunan. Kalau dipersentaskan, dari 102 sekolah yang ada di wilayah Simalungun, 46 sekolah menggunakan bahasa Simalungun, 41 bahasa Toba, 14 bahasa Melayu, dan 1 bahasa Karo. Dengan peningkatan jumlahnya yang cukup signifikan tersebut, menjadi sebuah keberhasilan yang diraih oleh orang-orang Simalungun dalam menjaga dan menguatkan identitas etniknya (Hutauruk, [1993](#)).

Dinamika panjang dalam pencarian dan penguatan identitas etnik Simalungun tersebut, menjadikan para tokoh-tokoh dan lembaga adat PMS diharuskan untuk membuat batasan-batasan dalam bidang bahasa dan aksara (penulisan) Simalungun. Tujuan ini sesuai dengan tuntutan (*manipol*) dalam agenda memajukan kebudayaan nasional, sehingga memerlukan kebudayaan daerah dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal yang tersimpan di dalamnya. Acara perumusan batas-batas bahasa dan aksara ini dilakukan pada 27 Februari 1964 yang dipimpin oleh O. Berlin Girsang.

Adapun hasil dari keputusan yang telah ditetapkan PMS adalah:

- 1) Bahasa Simalungun
 - a) Bahasa Simalungun menjadi alat pemersatu bagi setiap anggota masyarakat.
 - b) Bahasa Simalungun dapat menanggulangi atau menggalang segala potensi rakyat demi keutuhan dan menuju pembinaan Kebudayaan Nasional.
 - c) Bahasa Simalungun dapat memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan menjadi objek penelitian untuk penggalian sastra dan budaya daerah demi keagungan Kebudayaan Nasional.
- 2) Aksara Simalungun
 - a) Bahwa Aksara Simalungun ada 19 buah disebut *Surat Sapuluh Siah*.



- b) Menulis dari kiri ke kanan.
 - c) Aksara ini segera mungkin diteliti agar rahasia yang terpendam dalam pustaha-pustaha dapat digali.
- 3) Struktur dan Ejaan Bahasa Simalungun
 - a) Struktur disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia.
 - b) Ejaannya begitu diucapkan begitu dituliskan dalam huruf latin.

SIMPULAN

Lembaga adat Partuha Maujana Simalungun (PMS) telah berhasil menjaga dan melestarikan adat-istiadat etnik Simalungun dari berbagai dinamika dan intervensi berbagai kebudayaan asing. Lembaga ini juga berhasil menguatkan kembali identitas etnik Simalungun yang sebelumnya sudah mulai memudar, terutama pada masa-masa disintegrasi bangsa yang terjadi pada periodisasi dalam penelitian ini. Lewat penelitian ini penulis juga mengusulkan agar PMS melakukan penyusunan rencana strategis pengembangan dan pelestarian budaya Simalungun dalam menghadapi tantangan zaman agar kebudayaan Simalungun yang sudah diperjuangkan selama ini tidak berbaur kembali dengan kebudayaan asing.

REFERENSI

- Agustono, B., Suprayitno, Dewi, H., Dasuha, J. R. P., Saragih, H., Turnip, K., & Purba, S. D. (2012). *Sejarah Etnis Simalungun*. Pematang Siantar: Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia.
- Breman, J. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke-20* (K. S. Toer, trans.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah* (Cetakan II). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Damanik, E. L. (2017). *Nilai Budaya, Hakikat Karya Dan Orientasi Hidup Orang Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2018). *Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada Era Desentralisasi di Sumatera Utara*. Medan: Simetri Institute.
- Dasuha, J. R. P. (2003). *Tole! Den Timorlanden Das Evangelium!* Pematang Siantar: Kolportase GKPS.
- Hutauruk, J. R. (1993). *Kemandirian Gereja: Pemikiran Historis Sistematis Tentang Gerakan Kemandirian*

- Gereja di Sumatera Utara dalam Kancan Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan Indonesia, 1899-1942*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kozok, U. (1999). *Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lumbantobing, A. M. (1992). *Makna Wibawa Jabatan dalam Gereja Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Neiboer, F. J. *SoK Serie Ie No. Reel Film 21 Anvullende Memorie van Overgave van de*. (1934). Hindia-Belanda: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Pedersen. (1970). *Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja-Gereja Batak di Sumatera Utara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ponja, D., Siregar, Y. D., & Azhar, A. A. (2020). Dinamika Penyebaran Agama Islam di Kerajaan Siantar, 1904-1913. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(2), 55-60. <https://doi.org/10.34007/WARISAN.V1I2.521>
- Purba, C. (2003). Sepintas Etnik Simalungun dan Warisan Budayanya. In *Berkala Arkeologi "SANGKHAKALA"*. Medan: Pusat Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Medan.
- Purba, D. K. (1995). *Sejarah Simalungun*. Jakarta: Bina Budaya Simalungun.
- Purba, M. D. (1977). *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan: Penerbit M.D. Purba.
- Purba, R., Saragih, J., & Dkk. (2011). *Peradaban Simalungun: Inti Sari Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia Pertama tahun 1964*. Pematang Siantar: Komite Penerbit Buku Simalungun.
- Saragih, E., & Nababan, T. (2021). Kelompok Sitatang Atur Horja Adat Simalungun. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 440-446. <https://doi.org/10.31100/MATAPPA.V4I3.1069>
- Saragih, H. (2018). *Dinamika Penguat Identitas Etnik Simalungun (Hasimalungunon) di Balik Berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun*. Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, S. (2008). *Orang Simalungun*. Jakarta: CV. Citama Vigora.
- Sipahutar, M., Hutaauruk, A. F., & Asnewastri, A. (2019). Peran HKBP Sihorbo Tanjung dalam Penyebaran Agama Kristen Protestan di Desa Rura Tanjung Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, 1956-2018. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 28-40. Retrieved from <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/1687>
- Siregar, Z. (2020). Sejarah Terbentuknya Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.17977/umo20v14i12020p42-52>
- SoK Besluit No. 34.*, Pub. L. No. Bijlagen 10 (1904). Hindia-Belanda: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Tarigan, A. E. (2013). *Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen: Peranannya dalam Pelestarian Budaya Simalungun dan Penyebaran Agama Kristen (1928-1942)*. Universitas Sumatera Utara.
- Tarigan, H. G. (1987). *Bahasa dan Kepribadian Simalungun. Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun Ke III*. Pematang Siantar: Partuha Maujana Simalungun (PMS).